

Istilah solidaritas memang sudah memiliki wibawa yang tinggi. Namun justru karena itulah ia sering diombang-ambingkan dan bahkan disalahgunakan. Institusi-institusi dan regulasi pemerintah dianggap solider dan karenanya harus dinilai sebagai sesuatu yang bermoral. Sebaliknya, pasar dan persaingan dianggap tidak memperhatikan nilai sosial, dan dengan demikian dianggap tidak solider.

### *Solidaritas dan ekonomi pasar*

→ Ekonomi pasar menciptakan landasan materi agar manusia dapat bertindak secara solider. Kemakmuran besar saat ini, yang hanya dapat tercapai berkat sistem ekonomi pasar, membuka banyak kesempatan bagi setiap individu. Dewasa ini manusia semakin membutuhkan sedikit waktu untuk menjamin keperluan hidupnya, manusia memiliki semakin banyak sumber-sumber materi yang besar. Sistem ekonomi pasar khususnya, menuntut setiap individu untuk menjamin keperluan hidupnya dengan tenaga sendiri.

"Dalam pemahaman ekonomi pasar sosial, solidaritas memiliki dua sisi. Di satu sisi solidaritas berarti bantuan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan (miskin) untuk menanggung resiko yang tak bisa ia tanggung sendiri. Di sisi lain ditekankan juga rasa tanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang lain."

Otto Schlecht

Ekonomi pasar yang berjalan dengan baik sekaligus juga menyediakan mekanisme-

mekanisme yang menjadi instrumen untuk dapat memberikan jaminan terhadap resiko-resiko serta bantuan-bantuan pada berbagai masalah secara efektif. Komitmen pribadi, baik itu di tingkat swasta maupun dalam institusi-institusi yang dibentuk secara sukarela, mampu mengatasi berbagai masalah dan sekaligus memantapkan rasa solidaritas dalam masyarakat.

### *Solidaritas paksaan*

Mekanisme pemerintah yang khususnya dianggap mengusung nilai solidaritas adalah asuransi hari tua, asuransi kesehatan dan asuransi pengangguran. Setiap pekerja dan pemberi kerja (perusahaan) harus membayar asuransi ini, terlepas dari pertanyaan apakah yang bersangkutan mau atau tidak. Contoh mekanisme lain yang disebut-sebut mengusung nilai solidaritas adalah "perimbangan keuangan negara bagian".

Menurut pandangan liberal, "solidaritas paksaan" hanya diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu yang memang sangat mendesak, yakni apabila menyangkut penyediaan pendapatan minimum. Bantuan "solidaritas" seperti inipun diberikan manakala sumber-sumber daya sendiri dari yang bersangkutan tidak lagi memadai, untuk itu misalnya, ada konsep "dana rakyat" (Bürgergeld). Selain itu, pemerintah hanya harus mengatur ("memaksa") warganya untuk berasuransi dalam rangka mengantisipasi resiko-resiko yang besar, dan apabila dibutuhkan, pemerintah hanya menanggung secara keseluruhan atau sebagian biaya (premi) asuransi yang diperlukan.

### *Keikhlasan*

Solidaritas hanya punya kualitas moral apabila ia dilakukan atas dasar ikhlas atau sukarela. Hanya tindakan-tindakan yang didasari keikhlasan dapat dianggap punya nilai tambah bagi manusia. Suatu aksi atau tindakan hanya dapat dinilai aspek moralnya atau dinilai baik atau buruk, apabila si pelaku boleh mempertimbangkan tindakan apa yang ia pilih, apakah dan bagaimanakah ia melibatkan kriteria-kriteria moral dalam pertimbangannya. Dalam melakukan pertimbangan ini manusia harus mengikuti berbagai ukuran dari luar. Misalnya ada aturan-aturan masyarakat, seringkali ada berbagai sikap harapan dari orang lain. Sementara tidak selalu ada suatu kondisi di mana orang dituntut untuk bersikap sosial. Memang ada kasus-kasus yang jelas, misalnya pemberian bantuan langsung dalam keadaan darurat. Di sini jelas mana sikap yang solider dan secara moral dianggap baik. Yang menjadi masalah adalah apabila manusia harus memutuskan bagaimana ia menggunakan waktu dan sumber-sumber materinya.

"Syarat pertama untuk menghasilkan tindakan-tindakan yang mempunyai keindahan moral adalah kebebasan berkehendak, dan kebebasan ini hilang begitu kebaikan moral hendak dipaksakan melalui sanksi yang diatur UU."

Friedrich Schiller

### *Syarat-syarat solidaritas yang hakiki*

Solidaritas yang hakiki hanya dapat dilakukan oleh manusia yang hidup dalam kebebasan.

Mereka mengambil keputusan atas dasar nilai-nilai mereka sendiri, mereka dapat membantu orang lain, mereka dapat mendukung berbagai institusi. Bisa jadi ruang gerak mereka untuk bertindak berbeda-beda, tergantung pada kondisi kekayaan dan kemampuan mereka – akan tetapi, hampir setiap manusia mampu berbuat sesuatu untuk orang lain.

Tindakan mereka lebih cenderung dihalangi dari luar, khususnya oleh aturan pemerintah. Apabila manusia dipaksa untuk menyerahkan sebagian besar dari pendapatannya dalam berbagai bentuk kepada pemerintah, maka mereka tidak akan dapat lagi menggunakan pendapatan tersebut untuk tujuan-tujuan yang telah mereka tentukan sendiri. Dan ini berarti juga tidak untuk tujuan-tujuan yang sifatnya menguntungkan orang lain. Itu mengapa, adanya kebebasan yang sebesar-besarnya dalam mengatur hak milik (kekayaan) adalah syarat penting bagi tindakan yang solider, bagi masyarakat yang solider.

Institusi-institusi pemerintah, khususnya yang aktif dalam bidang sosial mengklaim bahwa mereka merupakan organisasi yang mengusung nilai solidaritas dan sekaligus mempromosikan aksi solidaritas warga. Dilihat dari berbagai aspek pernyataan ini problematis. Peluang warga untuk bertindak secara bertanggungjawab justru terbatas ketika sumber-sumber materi yang diperlukan untuk itu direnggut dari mereka. Artinya, dengan kewajiban membayar pajak dan kontribusi sosial yang jumlahnya hampir separuh dari pendapatan, warga tidak lagi mampu membiayai jaminan buat dirinya sendiri dan juga bantuan untuk orang lain.

Peluang untuk secara bersama-sama mencapai tujuan dalam perkumpulan-perkumpulan dan yayasan-yayasan dibatasi dengan adanya pengaturan yang rumit. Contohnya, mengurus anak-anak sendiri secara bersama-sama tidaklah mudah. Hal ini bisa dibenarkan oleh setiap orang yang pernah ikut mengurus proses perizinan toko anak-anak atau kegiatan serupa.

Sistem negara sosial yang berlaku sekarang juga mematikan motivasi untuk melakukan solidaritas yang hakiki. Apabila pemerintah menolong orang lain maka banyak orang tidak mempunyai alasan lagi untuk terlibat sendiri. Karena bukankah tanggungjawab mereka telah tergantikan dengan membayar pajak dan kontribusi sosial?

#### Literatur terkait tentang Solidaritas

- Kurt Bayertz, *Solidarität: Begriff und Problem* (Solidaritas: Pengertian dan permasalahan), Frankfurt /M., 1998

→ : Leaflet terkait tentang prinsip-prinsip liberal tersedia di kantor Friedrich-Naumann-Stiftung.

Friedrich-Naumann-Stiftung  
Jl. Rajasa II No. 7, Jakarta 12110, Indonesia  
Tel. 62-21-7256012; 7256013  
Fax: 62-21-7203868  
e-mail: [jakarta@indonesia.fnst.org](mailto:jakarta@indonesia.fnst.org)  
[www.kedai-kebebasan.org](http://www.kedai-kebebasan.org)  
[www.forum-politisi.org](http://www.forum-politisi.org)

## Solidaritas

Solidaritas merupakan bagian dari syarat dasar manusia untuk hidup saling berdampingan. Manakala manusia tidak saling bahu-membahu, dan tidak saling tolong-menolong dan → bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri serta orang lain, maka masyarakat bebas tidak akan dapat terwujud dengan baik. Solidaritas ada dalam tindakan individu dan masyarakat, dalam keluarga dan dalam perkumpulan-perkumpulan yang dibentuk atas dasar sukarela.

